

Abstrak

Hubungan kemitraan antara pengemudi online dan penyedia layanan masih diperdebatkan. Beberapa orang berargumen bahwa kemitraan yang terjadi adalah semu atau bahkan palsu, dan employer ingin menghindari regulasi ketenagakerjaan. Sebagai hasilnya, perlindungan hukum bagi pengemudi online tidak terpenuhi. Oleh karena itu, formulasi masalah adalah: (1) "bagaimana implementasi hubungan kemitraan antara pengemudi online dan penyedia layanan dalam melaksanakan aktivitas transportasi online?"; dan (2) "apa implikasi bagi perlindungan hukum bagi pengemudi online dalam hubungan kemitraan tersebut?". Berdasarkan itu, tujuan penelitian adalah: (1) untuk mengetahui implementasi hubungan kemitraan antara pengemudi online dan penyedia layanan dalam melaksanakan aktivitas transportasi online; dan (2) untuk mengetahui implikasi dari hubungan kemitraan antara pengemudi online dan penyedia layanan bagi perlindungan hukum bagi pengemudi online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan dukungan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah bahan hukum baik primer maupun sekunder, serta data primer dari wawancara dengan pengemudi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang ada saat ini tidak memenuhi elemen yang dibutuhkan, dan cenderung tidak adil bagi pengemudi online. Implikasinya adalah perlindungan hukum bagi pengemudi online tidak optimal. Oleh karena itu, harus segera dipastikan bahwa bentuk hubungan yang memberikan perlindungan hukum terbaik bagi pengemudi online didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Untuk alasan ini, semua pemegang kepentingan harus segera duduk bersama dengan mengesampingkan ego.

Kata Kunci : Kemitraan, Transportasi online, Perlindungan hukum



Abstract

The partnership relationship between online drivers and providers is still being debated. Some people argue that the partnership that occurs is pseudo, or even fake, and employers want to avoid labor regulations. As a result, legal protection for online drivers is not fulfilled. Thus, the formulation of the problem is: (1) "how is the implementation of the partnership relationship between online drivers and providers in implementing online transportation activities?" and (2) "what are the implications for legal protection for online drivers?". Based on that, the research objectives are: (1) to find out the implementation of the partnership relationship between online drivers and providers in implementing online transportation activities; and (2) to find out the implications of the partnership relationship between online drivers and providers for legal protection for online drivers. The approach used in this research is normative juridical with empirical juridical support. The data used are legal materials both primary and secondary, as well as primary data from interviews with online drivers. The results of the study show that the current partnership does not meet the required elements and tends to be unfair to online drivers. The implication is that legal protection for online drivers is not optimal. Therefore, it must be immediately ascertained that the form of relationship that provides the most legal protection for online drivers is based on the values of justice contained in formal rules and the values of justice in society. For this reason, all stakeholders must immediately sit together by setting aside sectoral egos.

Keywords: Partnership, Online transportation, Legal protection

